

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

Program Studi: Teknik Geodesi

Fakultas: Teknik

Mata Kuliah:	Pengadaan Lahan	Kode:	TGD21233	SKS:	2	Sem:	VI
Rumpun Mata Kuliah							
Tanggal Penyusunan				Rev	1		
Dosen Pengampu:	Ir. Sawitri Subiyanto, M.Si., Ir. Onang Onang W., MM.						
CP Lulusan Prodi	<input type="checkbox"/>	Memiliki Karakter dan Sikap Toleransi Keagamaan dan Kepercayaan, dan kebangsaan serta memiliki sikap yang beretika, bermoral, bersosial dan berintegritas. (CPL-A)					
	<input type="checkbox"/>	Mampu menguasai kemampuan dasar matematik, sains, teknologi informasi yang diterapkan dalam bidang keteknikan. (CPL-B)					
	<input type="checkbox"/>	Mampu menerapkan metode, keterampilan dan teknologi survei pemetaan geospasial tepat guna. (CPL-C)					
	<input type="checkbox"/>	Mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan dan isu-isu kekinian dalam bidang geospasial. (CPL-D)					
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mampu mendesain dan melaksanakan Penelitian dan Pekerjaan geospasial di laboratorium dan lapangan termasuk proses analisis dan interpretasi data. (CPL-E)					
	<input type="checkbox"/>	Mampu merancang komponen, proses dan sistem di bidang teknik geodesi yang mempertimbangkan aspek hukum, ekonomi, sosial, politik, etika, kesehatan dan keselamatan, serta keberlanjutan dalam tataran lokal dan global. (CPL-F)					
	<input type="checkbox"/>	Mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikan melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas. (CPL-G)					
	<input type="checkbox"/>	Mampu merencanakan, mengkoordinasi dan mengevaluasi detail pekerjaan secara individu maupun dalam kerja tim lintas disiplin dan budaya. (CPL-H)					

	<input type="checkbox"/>	Memiliki pemahaman akan pembelajaran berkelanjutan, jiwa kewirausahaan serta wawasan kontemporer. (CPL-I)					
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah:	<p>A. Mampu memahami (C2) tentang konsep pengadaan tanah dengan memperhatikan (A1) konsep dan asas-asas pengadaan tanah, asas-asas ganti rugi, aspek pertimbangan teknis pertanahan, konsep tentang hapus hak milik karena pencabutan hak dipakai kepentingan umum dan undang-undang/peraturan dalam pengadaan tanah.</p> <p>B. Mampu mengaplikasikan (C3) berbagai metode dan model pengadaan tanah dan aspek terapannya di bidang pertanahan dengan kebijakan pencadangan tanah (Bank tanah), pembangunan, pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar, tanah wakaf, konsolidasi tanah dan Industrial Estate bagi pengusaha, serta mampu mengimplementasikan (P3) proses instrumentasi kebijakan dan manajemen pembangunan wilayah dan kota.</p>						
Deskripsi singkat Mata Kuliah:	Mata kuliah ini membahas tentang deskripsi konsep pengadaan tanah dengan aspek pertimbangan teknis pertanahan dan undang-undang/peraturan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.						
1	2	3	4	5	6	7	
Minggu ke	Kemampuan Akhir tiap tahapan pembelajaran	Bahan Kajian/ Pokok Bahasan	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria & Indikator	Bobot (%)
1.	Mahasiswa mampu memahami (C2) dan memperhatikan (A1) konsep pengadaan lahan untuk kepentingan umum tanpa melihat catatan minimal 60% benar.	<ol style="list-style-type: none"> PengantarKuliah (kebijakan kuliah, ruang lingkup dan tatacara kuliah) Konsep Pengadaan lahan untuk kependingan umum Dasar hukum : Pasal 18 UUPA,UU No. 20 Th. 1961 ttg pencabutan HAT, Perpres No 65 Th 2006 Kriteria kependingan umum 	<ol style="list-style-type: none"> Ceramah <i>Small Group Discussion</i> 	TM: 1 x (2 x 50') BT + BM = 1 x [(2 x 60') + (2 x 60')]	Diskusi kelompok mahasiswa dengan topik pemahaman terhadap konsep pengadaan lahan untuk kepentingan umum	<ol style="list-style-type: none"> Ketepatan penjelasan konsep pengadaan lahan untuk kepentingan umum Ketekunan memperhatikan dan mendiskusikan materi pembelajaran. 	5%
2.	Mahasiswa mampu memahami (C2) dan memperhatikan (A1)	<ol style="list-style-type: none"> Prosedur Pengadaan Lahan Pembentukan 	<ol style="list-style-type: none"> Ceramah Discovery Learning 	TM: 1 x (2 x 50') BT + BM =	Diskusi kelompok mahasiswa dengan konsep prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Ketepatan penjelasan konsep prosedur pengadaan 	5%

	prosedur pengadaan lahan pada tahap perencanaan dan penetapan lokasi tanpa melihat catatan minimal 60% benar.	<p>Panitia Pengadaan Lahan (P2T) dan Tugas Panitia Pengadaan Lahan</p> <ol style="list-style-type: none"> Perencanaan dan Analisis kelayakan pengadaan lahan Penetapan Lokasi dan prosedur perijinan perolehan lahan dan jangka waktunya. 		$1 \times [(2 \times 60') + (2 \times 60')]$	pengadaan lahan pada tahap perencanaan dan penetapan lokasi	<p>lahan</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketekunan memperhatikan dan mendiskusikan materi pembelajaran. Keaktifan mahasiswa mempresentasikan tugas kuliah 	
3	Mahasiswa mampu memahami (C2) dan memperhatikan (A1) prosedur pengadaan lahan pada tahap perencanaan dan penetapan lokasi tanpa melihat catatan minimal 60% benar.	<ol style="list-style-type: none"> Penyuluhan, Identifikasi dan Inventarisasi Penilaian, musyawarah dan Keputusan Panitia Pengadaan Lahan Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak 	<ol style="list-style-type: none"> Ceramah Discovery Learning 	<p>TM: $1 \times (2 \times 50')$ BT + BM = $1 \times [(2 \times 60') + (2 \times 60')]$</p>	Diskusi kelompok mahasiswa dengan konsep prosedur pengadaan lahan pada tahap : Penyuluhan, Identifikasi dan Inventarisasi, Penilaian, musyawarah, Keputusan Panitia Pengadaan Lahan, Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak	<ol style="list-style-type: none"> Ketepatan penjelasan konsep prosedur pengadaan lahan Ketekunan memperhatikan dan mendiskusikan materi pembelajaran. Keaktifan mahasiswa mempresentasikan tugas kuliah 	5%
4	Mahasiswa mampu menganalisis (C4) dan memodifikasi (P2) konsep asas-asas umum pengadaan tanah dan asas-asas dalam pemberian ganti rugi tanpa melihat catatan minimal 60% benar.	<ol style="list-style-type: none"> Konsep Asas-asas umum pengadaan tanah :kemanusiaan; keadilan; pemanfaatan; kepastian; keterbukaan; kesepakatan Asas-asas dalam pemberian ganti rugi :Asas itikad baik, Asas keseimbangan, 	<ol style="list-style-type: none"> Ceramah Discovery Learning 	<p>TM: $1 \times (2 \times 50')$ BT + BM = $1 \times [(2 \times 60') + (2 \times 60')]$</p>	Mahasiswa melakukan studi literature terkait dengan konsep asas-asas umum pengadaan tanah dan asas-asas dalam pemberian ganti rugi .	<ol style="list-style-type: none"> Ketepatan penjelasan mengenai asas asan dalam pendaan tanah Ketekunan memperhatikan dan mendiskusikan materi pembelajaran. Keaktifan mahasiswa dalam presentasi tugas kuliah. 	10%

		Asas kepatutan, Asas kepastian dan Asas kesejahteraan.					
5	Mahasiswa mampu memahami (C2) dan memperhatikan (A1) konsep kebijakan pencadangan tanah pembangunan dan investasiserta pembentukan lembaga bank tanah menjamin ketersediaan tanah tanpa melihat catatan minimal 60% benar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep kebijakan pencadangan tanah pembangunan dan investasi 2. Penjelasan tentang liberalisasi tanah, melambungnya harga tanah dan kurangnya persediaan tanah 3. Teknis pengelolaan dan mekanisme kegiatan bank tanah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Small Group Discussion. 3. Simulasi. 	$TM: 1 \times (2 \times 50')$ $BT + BM = 1 \times [(2 \times 60') + (2 \times 60')]$	Mahasiswa mendiskusikan konsep kebijakan pencadangan tanah pembangunan investasidan pembentukan lembaga bank tanah menjamin ketersediaan tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan penjelasan konsep kebijakan pencadangan tanah 2. Ketekunan memperhatikan dan mendiskusikan materi pembelajaran. 3. Keaktifan mahasiswa dalam dalam menjelaskan fungsi bank tanah di Indonesia 	10%
6	Mahasiswa mampu menjabarkan (C1) dan menanggapi (A2) konsep pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar dan tanah wakaf tanpa melihat catatan minimal 60% benar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar (mengacu kepada Peraturan Kepala BPN RI No.4 Tahun 2010) 2. Konsep pendayagunaan tanah wakaf sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 UU Rusun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah. 2. Discovery Learning. 3. Cooperative Learning. 	$TM: 1 \times (2 \times 50')$ $BT + BM = 1 \times [(2 \times 60') + (2 \times 60')]$	Mahasiswa mendiskusikan konsep mengenai pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar dan tanah wakaf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan penjelasan cara penyediaan tanah 2. Ketekunan memperhatikan dan mendiskusikan materi pembelajaran. 3. Keaktifan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas presentasi 	5%
7	Mahasiswa mampu menjabarkan (C1) dan menanggapi (A2) konsep penyediaan tanah dengan konsolidasi tanah tanpa melihat catatan minimal 60% benar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsolidasi Tanah untuk Pengadaan Tanah yang Partisipasif dan Penataan Ruang yang Terpadu 2. Dasar pelaksanaan konsolidasi tanah menurut pasal 1 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah. 2. Discovery Learning. 3. Cooperative Learning. 	$TM: 1 \times (2 \times 50')$ $BT + BM = 1 \times [(2 \times 60') + (2 \times 60')]$	Mahasiswa mendiskusikan konsep mengenai penyediaan tanah dengan konsolidasi tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan penjelasan cara penyediaan tanah 2. Ketekunan memperhatikan dan mendiskusikan materi pembelajaran. 3. Keaktifan mahasiswa 	10%

		<p>angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PKBPN) No. 4 Tahun 1991 dan Penjelasan Pasal 11 Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2010</p> <p>3. Penjelasan manfaat dan hasil dari konsolidasi tanah</p> <p>4. Contoh perhitungan konsolidasi tanah Tanah : Pengganti Biaya Pelaksanaan (TPBP) atau Cost. Equivalent Land (CEL)</p>				<p>dalam mempraktekkan perhitungan Pengganti Biaya Pelaksanaan (TPBP) atau Cost. Equivalent Land (CEL)</p>	
8	<p>Mahasiswa mampu memahami (C2) dan memperhatikan (A1) konsep tentang hapus nya hak milik karena pencabutan hak dipakai kepentingan umum tanpa melihat catatan minimal 60% benar.</p>	<p>1. Penjelasan isi tentang UU 5/1960 Pasal 27 tentang hapus nya hak milik karena pencabutan hak dipakai kepentingan umum,</p> <p>2. Penjelasan pasal 34 dan Pasal 40 hapus nya Hak Tertentu, HGU</p>	<p>1. Ceramah</p> <p>2. <i>Small Group Discussion</i></p>	<p>TM: $1 \times (2 \times 50')$</p> <p>BT + BM = $1 \times [(2 \times 60') + (2 \times 60')]$</p>	<p>Diskusi kelompok mahasiswa dengan topik pemahaman terhadap konsep tentang hapus nya hak milik karena pencabutan hak dipakai kepentingan umum</p>	<p>1. Ketepatan penjelasan konsep tentang hapus nya hak milik karena pencabutan hak dipakai kepentingan umum</p> <p>2. Ketekunan memperhatikan dan mendiskusikan materi embelajaran.</p>	5%
9	<p>Mahasiswa mampu memahami (C2) dan memperhatikan (A1) masalah penyediaan tanah dan aspeknya tanpa melihat catatan minimal 60% benar.</p>	<p>1. Masalah Penyediaan Tanah dan Aspeknya untuk Industri,</p> <p>2. Bidang Yuridis,</p> <p>3. Bidang Prosedure,</p> <p>4. Bidang Finansial;</p>	<p>1. Ceramah</p> <p>2. Discovery</p> <p>3. Learning</p>	<p>TM: $1 \times (2 \times 50')$</p> <p>BT + BM = $1 \times [(2 \times 60') + (2 \times 60')]$</p>	<p>Diskusi kelompok mahasiswa dengan konsep masalah penyediaan tanah dan aspeknya</p>	<p>1. Ketepatan penjelasan konsep masalah penyediaan tanah dan aspeknya</p> <p>Ketekunan memperhatikan dan mendiskusikan materi pembelajaran</p>	5%

						2. Keaktifan mahasiswa mempresentasikan tugas kuliah	
10	Mahasiswa mampu memahami (C2) dan memperhatikan (A1) prosedur Industrial Estate bagi pengusaha tanpa melihat catatan minimal 60% benar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur Industrial Estate Bagi Pengusaha 2. Keuntungan dengan adanya Industrial Estate bagi pengusaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Discovery Learning 	$TM: 1 \times (2 \times 50')$ $BT + BM = 1 \times [(2 \times 60') + (2 \times 60')]$	Diskusi kelompok mahasiswa dengan konsep prosedur Industrial Estate bagi pengusaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan penjelasan konsep prosedur Industrial Estate bagi pengusaha 2. Ketekunan memperhatikan dan mendiskusikan materi pembelajaran 3. Keaktifan mahasiswa mempresentasikan tugas kuliah 	5%
11	Mahasiswa mampu menganalisis (C4) dan memodifikasi (P2) konsep Opzet Yuridisnya dari segi Hukum Tanah tanpa melihat catatan minimal 60% benar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep Opzet Yuridisnya dari segi Hukum 2. Penjelasan unsur subjektif: Kesengajaan (<i>dolus</i>), kealpaan (<i>culpa</i>), Niat (<i>voornemen</i>), Maksud (<i>oogmerk</i>), pemerasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Discovery 3. Learning 	$TM: 1 \times (2 \times 50')$ $BT + BM = 1 \times [(2 \times 60') + (2 \times 60')]$	Mahasiswa melakukan studi literature terkait dengan konsep Opzet Yuridisnya dari segi Hukum Tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan penjelasan mengenai Opzet Yuridisnya dari segi Hukum Tanah 2. Ketekunan memperhatikan dan mendiskusikan materi pembelajaran. 3. Keaktifan mahasiswa dalam presentasi tugas kuliah. 	10%
12	Mahasiswa mampu memahami (C2) dan memperhatikan (A1) konsep kebijakan bagaimana Industrial Estate memperoleh tanah tanpa melihat catatan minimal 60% benar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan Keppres Nomor 33 Tahun 1990, tentang Penggunaan Tanah bagi Pembangunan Kawasan Industri dan Keppres Nomor 53 tahun 1993, tentang Kawasan Industri 2. Izin Usaha Kawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Small Group Discussion. 3. Simulasi. 	$TM: 1 \times (2 \times 50')$ $BT + BM = 1 \times [(2 \times 60') + (2 \times 60')]$	Mahasiswa mendiskusikan kebijakan bagaimana Industrial Estate memperoleh tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan penjelasan konsep kebijakan bagaimana Industrial Estate memperoleh tanah 2. Ketekunan memperhatikan dan mendiskusikan materi pembelajaran. 	5%

		<p>Industri bagi Perusahaan Kawasan Industri</p> <p>3. Ketentuan pencadangan tanah dan/atau pemberian ijin lokasi dan ijin pembebasan tanah bagi setiap perusahaan kawasan industri</p>				<p>3. Keaktifan mahasiswa dalam dalam menjelaskan tahapan industry memperoleh tanah</p>	
13	<p>Mahasiswa mampu menjabarkan (C1) dan menanggapi (A2) konsep masalah tanah yang belum dibebaskan tanpa melihat catatan minimal 60% benar.</p>	<p>1. Konsep masalah tanah yang belum dibebaskan</p> <p>2. Pendekatan HAM dalam pembebasan tanah</p> <p>3. Perspektif Hukum Agraria dalam pembebasan tanah</p>	<p>1. Ceramah.</p> <p>2. Discovery Learning.</p> <p>3. Cooperative Learning.</p>	<p>TM: $1 \times (2 \times 50')$</p> <p>BT + BM = $1 \times [(2 \times 60') + (2 \times 60')]$</p>	<p>Mahasiswa mendiskusikan konsep mengenai masalah tanah yang belum dibebaskan</p>	<p>1. Ketepatan penjelasan masalah tanah yang belum dibebaskan</p> <p>2. Ketekunan memperhatikan dan mendiskusikan materi pembelajaran.</p> <p>3. Keaktifan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas presentasi</p>	10%
14	<p>Mahasiswa mampu menjabarkan (C1) dan menanggapi (A2) konsep pembebasan dan pencabutan; prinsip hukum pertanahan; pembebasan tanah versi RTRW tanpa melihat catatan minimal 60% benar.</p>	<p>1. Konsep pembebasan dan pencabutan;</p> <p>2. Penjelasan prinsip hukum pertanahan;</p> <p>3. Penjelasan pembebasan tanah versi RTRW</p>	<p>1. Ceramah.</p> <p>2. Discovery Learning.</p> <p>3. Cooperative Learning.</p>	<p>TM: $1 \times (2 \times 50')$</p> <p>BT + BM = $1 \times [(2 \times 60') + (2 \times 60')]$</p>	<p>Mahasiswa mendiskusikan konsep mengenai pembebasan dan pencabutan; prinsip hukum pertanahan; pembebasan tanah versi RTRW</p>	<p>1. Ketepatan penjelasan konsep pembebasan dan pencabutan; prinsip hukum pertanahan; pembebasan tanah versi RTRW</p> <p>2. Ketekunan memperhatikan dan mendiskusikan materi pembelajaran.</p>	5%
8. Daftar Referensi:		1. Prof. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah (Edisi					

	<p>2008), Penerbit Djembatan, Jakarta</p> <ol style="list-style-type: none">2. Sitorus Oloan, Dayat Limbang, 2004, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta3. Sudjito dkk, 2012, Restorasi Kebijakan Pengadaan Tanah, Perolehan, Pelepasan Dan Pendayagunaan Tanah, Serta Kepastian Hukum Di Bidang Investasi, Tugujogja Pustaka. Yogyakarta4. Keputusan Ka. BPN No 2 Thn 2003 Tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Perpres No. 36 Thn 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan5. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

